

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Barat)

¹Nur Hayadi, ²Iin Rosini

^{1,2}Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Tangerang Selatan

(mazsnoer.04@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the understanding of government accounting standards and regional financial oversight of the quality of financial reports in West Jakarta Administrative City. The sample is determined by the Simple Random Sampling technique. The type of data used in this study is primary data. Data collection is done by distributing questionnaires by giving a set of written statements to respondents to answer using the Likert scale. 41 questionnaires were distributed and 40 questionnaires were returned. The data analysis technique used is by data quality test and hypothesis test by using Multiple Regression Analysis. The results of this study indicate that the understanding of government accounting standards and regional financial supervision simultaneously has a positive and significant effect on the quality of financial statements in West Jakarta Administrative City.

Keywords: Understanding of Government Accounting Standards, Regional Financial Supervision, Quality of Financial Statements

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Kota Administrasi Jakarta barat. Sampel ditentukan dengan teknik *Simple Random Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dengan memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dengan menggunakan skala *likert*. kuesioner yang disebar sebanyak 41 kuesioner dan kembali sebanyak 40 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan uji kualitas data dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kata Kunci :Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka diperlukan pemahaman dari sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mengenai standar akuntansi pemerintahan, hal ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan). Selain itu, untuk

menyusun laporan keuangan yang handal dan dapat digunakan dengan baik oleh para pemakai, maka diperlukan pengawasan laporan keuangan daerah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Arfianti, 2011 dalam Pujiswara, Herawati, dan Sinarwati, 2014).

Terkait dengan fenomena tentang akuntabilitas dan transparansi melalui opini laporan keuangan pemerintah daerah, Jakarta Barat sebagai kotamadya yang sedang melaksanakan pemantapan kinerja pemerintah daerahnya melalui peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, juga berkepentingan dengan opini BPK terhadap kualitas laporannya. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah khususnya Kota Administrasi Jakarta barat yang juga diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 162 tahun 2013 tentang pedoman penatausahaan keuangan daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 tahun 2013 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 156 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi DKI Jakarta, memiliki beberapa kendala dalam penyusunan laporan

keuangannya, seperti masih lemahnya pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dari beberapa pegawai atau sumber daya manusianya yang terlibat dalam proses penyusunan laporan tersebut. Kemudian dari sisi pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut masih terdapat beberapa kendala seperti penetapan waktu yang kurang dan terbatasnya sumber daya manusianya yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau belum sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut maka diperlukan adanya pengetahuan yang baik tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Seberapa besar pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan? 2). Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan? 3). Seberapa besar pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan?

LANDASAN TEORI

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah teori *stakeholder*. Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409) Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*

perusahaan tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan standar akuntansi pemerintahan antara lain penyaji laporan keuangan, auditor, masyarakat pengguna laporan keuangan, organisasi profesi akuntansi, akademisi dan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011:271). Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Dalam sejarah perkembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia terdapat dua produk perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP No. 71 Tahun 2010 merupakan pengganti dari peraturan standar akuntansi lama dalam PP No. 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sedangkan PP No. 71 Tahun 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh (*full accrual*).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juwita (2013) tentang pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem

informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, mendapatkan hasil yaitu, implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, Nadirsyah dan Bakar (2010) tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan mendapatkan hasil yaitu, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama dirumuskan:

H₁ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara, Herawati dan Sinarwati (2014) tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah mendapatkan kesimpulan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliarta (2013) tentang pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan mendapat kesimpulan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh

signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan *intern* maupun pengawasan *ekstern*. Dari uraian tersebut maka, hipotesis kedua dapat dirumuskan:

H₂ : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan hipotesis pertama dan kedua, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan:

H₃ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, dimana penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai atau SKPD pada Kota Administrasi Jakarta Barat yang berjumlah 139 orang. Dalam penentuan sampel pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini diambil dari pegawai/staff bagian keuangan dan pegawai/staff bagian inspektorat pembantu kota yang berjumlah 41 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung

kepada para responden. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk skala *likert*. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban yang memiliki skor 1-5, yaitu Sangat Setuju (SS), dan Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Ragu-ragu (R), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Uji analisis data yaitu uji hipotesis yang meliputi 1). Uji regresi berganda, pengujian ini digunakan karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua atau tiga variabel. 2). uji t (uji regresi parsial), Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan atau dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu variabel independen (X) yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X_1) dan pengawasan keuangan daerah (X_2) dan variabel dependen (Y) yaitu kualitas laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada uji regresi berganda ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	10,477	6,016
Standar Akuntansi Pemerintahan	,580	,161
Pengawasan Keuangan Daerah	,276	,131

Berdasarkan tabel 1.1 hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi, maka dapat dibuat suatu persamaan sebagai berikut:

$$Y = 10,477 + 0,580X_1 + 0,276 X_2 + 6,016$$

Dari hasil persamaan tersebut disimpulkan bahwa:

- Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 10,477. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka kualitas laporan keuangan nilainya sebesar 10,477.
- Koefisien regresi pada variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,580, hal ini berarti jika variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan bertambah satu satuan, maka kualitas laporan keuangan meningkat sebanyak 0,580. Koefisien ini bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, semakin besar pemahaman standar akuntansi pemerintahan dari manajemen atau pegawai keuangan semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya.
- Koefisien regresi pada variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 0,276, hal ini berarti jika variabel pengawasan keuangan daerah bertambah satu satuan maka kualitas laporan keuangan meningkat sebanyak 0,276. Koefisien ini bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, semakin besar pengawasan keuangan yang dilakukan inspektorat/BPK maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

manajemen atau pegawai keuangan, begitu pula sebaliknya.

Pada uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 33,4% kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah, sedangkan sisa (100%-33,4% = 66,6%) kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Adjusted R Square
1	,334

Selanjutnya pada hasil uji koefisien korelasi menunjukkan nilai signifikansi dari pemahaman standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan sebesar 0.000 dan pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan sebesar 0.015 dimana keduanya lebih kecil dari nilai α 0.05, artinya terdapat hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan dan pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan. Kemudian kekuatan hubungan antara variabel kualitas laporan keuangan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,540 dan kualitas laporan keuangan dengan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,381 yang artinya kekuatan hubungan kuat dan searah terjadi pada kualitas laporan keuangan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan dengan pengawasan keuangan daerah, karena satu variabel meningkat maka akan meningkatkan variabel yang lainnya. Hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Hasil Uji Koefisien Korelasi

		Correlations		
		Standar Akuntansi Pemerintahan	Pengawasan Keuangan Daerah	Kualitas Laporan Keuangan
Standar Akuntansi Pemerintahan	P. Correlation	1	,206	,540**
	Sig. (2-tailed)		,202	,000
	N	40	40	40
Pengawasan Keuangan Daerah	P. Correlation	,206	1	,381*
	Sig. (2-tailed)	,202		,015
	N	40	40	40
Kualitas Laporan Keuangan	P. Correlation	,540**	,381*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,015	
	N	40	40	40

Selanjutnya pada hasil uji t (uji regresi parsial) ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4

Hasil Uji t (uji regresi parsial)

Model	t	Sig.
(Constant)	1,742	,090
Standar Akuntansi Pemerintahan	3,608	,001
Pengawasan Keuangan Daerah	2,113	,041

Untuk menentukan distribusi t dicari pada $\alpha = 10\%:2 = 5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n-k dimana d(f) = 40 - 3 = 37. Dengan pengujian 2 sisi signifikansi = 5% (lihat lampiran) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,026 (Sugiyono, 523:2010). Dari tabel 1.3 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X_1) memiliki probabilitas Sig. Sebesar 0,001 yang dimana lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari tabel tersebut dapat diketahui nilai t_{hitung} sebesar 3,608

dan t_{tabel} sebesar 2,026 sehingga t_{hitung} 3,608 \geq t_{tabel} 2,026. Jadi dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa koefisien regresi pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. sehingga hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan “diterima”.

b) Variabel pengawasan keuangan daerah (X_2) memiliki probabilitas Sig. sebesar 0,041 dimana lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari tabel tersebut dapat diketahui nilai t_{hitung} sebesar 2,113 dan t_{tabel} sebesar 2,026 sehingga t_{hitung} 2,113 \geq t_{tabel} 2,026. Jadi dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa koefisien regresi pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dapat “diterima”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sari, Adiputra dan Sujana (2014) yaitu bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian sama halnya dengan penelitian sebelumnya oleh Haza (2013) yaitu bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

PENUTUP

Penelitian ini didapatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin tinggi pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan oleh para pegawai keuangan atau manajemen maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya akan meningkat.
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat ataupun BPK akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
3. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti seperti, keterbatasan dari objek penelitian, sampel penelitian, keterbatasan dari studi kepustakaan atau buku-buku literatur yang digunakan dan ilmu serta wawasan dari peneliti.

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Kota Administrasi Jakarta Barat diharapkan untuk lebih meningkatkan pemahaman dari para SKPD khususnya bagian keuangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan serta meningkatkan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Untuk pemerintah melalui BPK diharapkan untuk lebih meningkatkan

pengawasan terhadap laporan keuangan daerah agar dalam proses penyusunannya tetap mengikuti ketentuan-ketentuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan metode survey berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menambahkan metode lain seperti wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, selain itu dapat menambah variabel bebas lain yang terkait atau memiliki indikasi berpengaruh dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2009.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007.
- Haza, Irfan Ikhwanul. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Artikel, Universitas Negeri Padang*. 2013.
- Juwita, Rukmi. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika Volume 12, No. 2, Hal. 201-214*. 2013.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku I. Edisi Kedua, Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. 2010.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama, Penerbit UII Press. Yogyakarta. 2011.
- Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 2007.
- Permana, Irvan. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Akuntabilitas (Survei Pada Dinas Kota Bandung)*. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia. Bandung. 2011.
- Permendagri No. 64 Tahun 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*, Penerbit Fokusmedia. Bandung. 2014.
- Pujiswara, Ida Bagus, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol. 2, No. 1*. 2014.
- Rachmat. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan 1, Penerbit Pustaka Setia. Bandung. 2010.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010.

------. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2004.

Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Penerbit Alfabeta. Bandung. 2010.

Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra dan Edy Sujana. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No. 1*. 2014.

Sudarmanto, R. Gunawan. *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistics 19*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke 15, Penerbit Alfabeta. Bandung. 2010.

------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke 16, Penerbit Alfabeta. Bandung. 2012.

Yuliani, Safrida, Nadirsyah dan Usman bakar. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Hal. 206-220*. 2010.

Yuliarta. Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). *Artikel, Universitas Negeri Padang*. 2013

